

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adam, Muhammad, 1985, *Asal-Usul Sejarah Akta Notarial*, Sinar Baru, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Majelis Pengawas Notaris sebagai pejabat tata usaha negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1984, *Notaris I*, Sumur, Bandung.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, H.Zaeni dan Rahman, Arief, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada.
- Budiman, F.Hardi, 2011, *Hak-Hak Asasi Manusia Polemik dengan Agama dan kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Djamali, R. Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, A. Masyur dan Evandri, Taufani S, 2014, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial (cetakan IV)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Howard, Rhoda E., 1995, *Human Rights and the search for community*, terj. Nugraha Katjasungkana, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000).
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (cetakan ke 5)*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Marbun, SF. dan MD, Moh Mahfud, 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (edisi revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum suatu pengantar cetakan II*, liberty, Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM menggurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, 1990, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Bussines Law (CDSBL)*, Yogyakarta.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Ahmad Sodik, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Sadjijiono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tingkat tujuan)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris cetakan kelima*, Erlangga, Jakarta.
- Wajong, J, 1969, *Fungsi Administrasi Negara*, Djambatan, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1727)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128)

### C. Artikel, Jurnal dan Tesis:

Eide, Asbjorn, 2001, "*Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi Manusia*", pada buku *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (edisi kedua)* (ed) Asbjorn Eide, dkk, *Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)*, Jakarta.

Eide, Asbjorn dan Rosas, Allan, 2001, "*Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Sebuah Tantangan Bagi Dunia*", pada buku *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (edisi kedua)* (ed) Asbjorn Eide, dkk, *Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)*, Jakarta.

Tobes, Brigit, 2001, "*Hak Atas Kesehatan*", pada buku *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (edisi kedua)* (ed) Asbjorn Eide, dkk, *Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)*, Jakarta.

Amir, Latifah dan Noviades, Dhils's, 2014, *Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Vol 5, No 1, ISSN 2087-5478, diakses melalui: <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/1962>, Pada tanggal 18-12-2017, Pukul 02.18 WIB.

Lembaga Administrasi Negara Deputi Bidang Kajian Kebijakan Pusat Kajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara, *Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat.

Hardika, "*Kepemilikan Sertifikat Cuti Bagi Notaris Di Kabupaten Batul*", Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014

Irani Cut, "*Ketidaklengkapan Peraturan Jabatan Notaris Pengganti dan Akibat Hukumnya*", Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009

Syaifuddin, Muhammad, "*Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Berkeaan Dengan Izin Cuti Notaris Di Kota Banjarmasin*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011

### D. Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga cetakan ke II*, Balai Pustaka, Jakarta